

**PENINGKATAN MUTU MADRASAH MELALUI PENGUATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT
La Adu**

Abstract

Quality in the context of education is a prinhjk,ocess to do it right the first time and make continuous improvements from setting the vision, mission, purpose, operation, monitoring, and evaluation of substances intended for meaningful education, that begins from input-process and out-put, up to the level of outcome. In the world of education, including the madrasa, community satisfaction will be realized when the madrasa's' quality has continuous benefit for society.

Keywords: *Education, Madrasa, Society*

Abstrak

Mutu dalam konteks pendidikan adalah sebuah proses untuk melakukan secara benar sejak awal dan melakukan perbaikan secara terus menerus mulai dari penetapan visi-misi, tujuan, operasionalisasi, monitoring, dan evaluasi yang ditujukan bagi substansi pendidikan yang bermakna, mulai dari input-proses, dan output, hingga ke tingkat outcome. Dalam dunia pendidikan, termasuk madrasah, kepuasan masyarakat akan terwujud bila madrasah menunjukkan mutu yang berkesinambungan dan lulusan madrasah dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : *Pendidikan, Madrasah, Masyarakat*

A. Pendahuluan

Pengelolaan pendidikan yang menekankan kemandirian sekolah merupakan penjabaran dari otonomi pendidikan di sekolah. Pemberian otonomi pendidikan kepada sekolah merupakan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan secara luas, sehingga sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekitar.

Pada penyelenggaraan pendidikan, baik oleh pemerintah maupun yayasan, akan menjadi sorotan bagi masyarakat mengenai bermutu atau tidaknya proses dan layanan yang dilangsungkan pada sekolah atau madrasah yang dikelola. Penyelenggaraan pendidikan harus bermutu dan memiliki akuntabilitas tinggi, inilah yang menjadi harapan masyarakat. Madrasah yang melibatkan masyarakat akan memunculkan partisipasi dan rasa memiliki serta tanggung jawab masyarakat tersebut.

B. Pendidikan Bermutu

Apapun bidang pendidikan yang diteliti, sasaran akhir yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan mutu. Mutu merupakan derajat keunggulan sebuah produk atau pelayanan. Sebuah produk yang bersaing dengan produk lainnya atau suatu pelayanan jasa bersaing dengan pelayanan jasa lainnya memiliki tingkat keunggulan relatif. Produk atau pelayanan jasa yang lebih unggul adalah produk atau pelayanan jasa yang bermutu. Mutu merupakan kesempatan ajang berkompetisi sangat berharga, karena itu munculnya kompetitor merupakan sebuah wahana untuk meningkatkan mutu produk layanan jasa. Dengan demikian, mewujudkan pendidikan dengan mengikuti standar mutu adalah penting, sebagai bagian dari produk layanan jasa.

Standar yang menjadi acuan pendidikan dasar dan menengah, di mana Madrasah Tsanawiyah termasuk di dalamnya, adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II tentang lingkup, fungsi dan tujuan. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan tentang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi : a) Standar isi ; b) Standar proses, c) Standar kompetensi lulusan, d) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, e) Standar sarana dan prasarana, f) Standar pengelolaan, g) Standar pembiayaan, dan h) Standar penilaian pendidikan. Pada pasal 54 ayat (4) dinyatakan bahwa pengelolaan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik, dan komite sekolah/madrasah. Dengan mengacu pada standar ini jelaslah bahwa pengelolaan pendidikan pada madrasah merupakan bagian dari standar pengelolaan dengan melibatkan komite madrasah yang terdiri dari unsur stakeholders, orang tua siswa, dan masyarakat. Dan, pengelolaan tersebut harus sejalan dengan standar atau mutu.

Dalam memberikan definisi mutu, perlu dipahami perbedaan antara tiga macam terminologi yang berkaitan dengan mutu, yaitu pengawasan mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality assurance*), dan mutu total (*total quality*).¹ Pengawasan mutu adalah mendeteksi dan menghapus komponen atau produk akhir yang tidak mencapai standar. Pemeriksaan dan pengujian adalah metode yang biasanya digunakan dalam pengawasan mutu, termasuk dalam dunia pendidikan. Jaminan mutu lain lagi, yaitu

¹ Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan, 1993), hlm. 18

melakukan cek sebelum dan selama proses berlangsung, agar kesalahan dapat dicegah lebih awal. Jaminan mutu adalah merancang mutu untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Ringkasnya, jaminan mutu adalah memproduksi produk yang bebas dari kesalahan. Philip B. Crosby menyebutnya dengan istilah *zero defects*. Jaminan mutu konsisten memenuhi spesifikasi produk secara tepat waktu. Penjaminan mutu ini menjadi sebuah sistem yang menetapkan bagaimana produksi dilakukan sesuai standar dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Sedangkan mutu total atau TQM menggabungkan pengawasan dan penjaminan mutu, secara lebih luas. TQM adalah menciptakan budaya mutu yang dapat menyenangkan pelanggan, dan membentuk struktur organisasi dalam penerapannya. TQM adalah menyediakan apa yang diinginkan pelanggan. Sistem ini berbuat sesuai harapan pelanggan serta mendesain produk dan jasa yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Karena persepsi dan harapan pelanggan sering berubah-ubah, sistem harus menemukan cara agar terus menarik pelanggan dengan merespon perubahan selera, kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Gronroos menunjukkan tiga kriteria pokok dalam menilai kualitas jasa, yaitu *outcome-related*, *process-related*, dan *image related criteria*.² Dari ketiga kriteria itu dideskripsikan enam unsur karakteristik jasa yang bermutu, yaitu: *Pertama*, profesionalisme dan keahlian, merupakan kriteria utama, yang membuat pelanggan percaya bahwa SDM penyedia jasa memiliki syarat profesionalisme dan keahlian yang mumpuni sekaligus dapat menghasilkan produk yang bermutu. *Kedua*, sikap dan perilaku yang ditunjukkan personil penyedia jasa dalam melayani atau melaksanakan proses sangat empatik dan siap membantu pelanggan. *Ketiga*, *accessibility and flexibility*, yakni sebuah proses yang dirancang secara fleksibel untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan akses. *Keempat*, *reliability and truthworthiness*, yaitu reputasi yang baik dan selalu menjaga kepercayaan pelanggan menjadikan pelanggan yakin dengan apa yang diberikan oleh penyedia jasa adalah sebuah pelayanan yang bermutu. *Kelima*, *recovery*, bila terjadi kesalahan atau keluhan, pelanggan tidak akan cemas karena mereka percaya penyedia jasa dapat menemukan pemecahan masalahnya. Dan *keenam*, *reputation and credibility*, yaitu kesan yang

² Engkoswara, dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 305

dirancang oleh penyedia jasa adalah menjaga reputasi dan loyalitas pelanggan.

Edward Deming yang dikenal sebagai bapak “manajemen mutu”. mengatakan bahwa untuk membangun mutu harus dilakukan perbaikan secara terus menerus (*cotinuuous quality improvement*). Siklus dimulai sejak adanya gagasan tentang suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, distribusi kepada pelanggan, sampai mendapatkan umpan balik dari pelanggan yang menjadi inspirasi untuk menciptakan produk baru atau meningkatkan mutu produk sebelumnya. Konsep Deming tentang langkah-langkah strategis perbaikan mutu secara terus menerus disebut Deming sebagai *The Deming Cycle*, yang terdiri dari *Plan, Do, Control, dan Action* (PDCA). Sistem manajemen itu direalisasikan dengan 14 poin prinsip manajemen Deming, yaitu:

- a. Ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa, dengan tujuan menjadi lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis serta memberikan lapangan kerja.
- b. Adopsi filosofi baru. Bahwa lingkungan selalu berubah dan berimplikasi pada perubahan organisasi dan menjadi tanggungjawab pemimpin untuk menjadi pelopor pembaharuan.
- c. Hentikan ketergantungan pada inspeksi massal untuk memperoleh mutu.
- d. Akhiri kebiasaan bisnis hanya berdasarkan harga, sebaliknya minimumkan biaya total.
- e. Perbaiki sistem produksi dan jasa secara konstan dan terus menerus hingga dapat mengurangi biaya.
- f. Lembagakan metode pelatihan yang modern di tempat kerja.
- g. Lembagakan kepemimpinan yang mampu menampilkan perilaku yang mendorong staf bekerja lebih produktif.
- h. Hilangkan rasa takut dalam bekerja sehingga setiap orang dapat bekerja secara efektif untuk organisasi.
- i. Pecahkan hambatan di antara departemen.
- j. Hilangkan slogan, ketergesa-gesaan, dan target untuk mencapai “nol kesalahan” dan tingkatkan produktivitas baru yang lebih tinggi.
- k. Hilangkan kuota numerik, atau target target berupa angka.
- l. Hilangkan hambatan pada kebanggaan terhadap keterampilan kerja.
- m. Lembagakan program pendidikan dan pengembangan diri secara serius.
- n. Lakukan tindakan untuk melakukan transformasi. Setiap orang dalam organisasi harus mentransformasikan butir-butir di atas.³

Berkaca dari beragam konsep tentang mutu tersebut, pendidikan termasuk pada upaya memberikan jasa yang maksimal kepada pelanggan. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah paduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif *establish* dan

³ Engkoswara, dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, hlm. 307.

sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sallis mengemukakan bahwa standar mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a. Standar produk atau jasa yang diidentifikasi melalui (1) sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau *conformance to specification*; (2) sesuai dengan penggunaan atau tujuan, atau *fitness for purpose or use*; (3) produk tanpa cacat atau *zero defect*; dan (4) sekali benar dan seterusnya benar atau *right first time, every time*.
- b. Standar untuk pelanggan yang diidentifikasi dengan: (1) kepuasan pelanggan atau *customer satisfaction*, bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau *exceeding customer expectation*; dan (2) setia kepada pelanggan atau *delighting to the customer*.⁴

Manajemen mutu sesungguhnya merupakan metode atau sebuah proses dan bukan tujuan atau hasil. Karenanya, implementasi manajemen mutu mengacu pada sebuah indikator yang menjadi nilai mutu atau *core-values* yaitu kepuasan dan loyalitas semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders satisfaction and loyalty*). Untuk mencapai kepuasan dan loyalitas pelanggan maka manajemen mutu harus berorientasi pada budaya mutu, dengan menekankan pada kinerja yang bersifat *zero-defects*, *adaptive to change*, dan selalu mengupayakan *continuous improvement (kaizen)*, agar mampu mengadakan *competitive-benchmarking*, terutama dalam praktek operasional kerja terbaik.

Pada awalnya manajemen mutu berasal dari bidang bisnis. Konsep manajemen mutu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan organisasi di dunia bisnis, sebagai dampak dari semakin tajamnya persaingan dalam bidang usaha. Pada perkembangannya, konsep ini juga diterapkan di bidang industri jasa termasuk pendidikan. Pengelolaan lembaga pendidikan akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip manajemen mutu. Dan berdampak kepada efisiensi pelaksanaan program, meningkatnya kualitas dan produktivitas pendidikan yang pada akhirnya menjadikan lembaga pendidikan bermutu.

Hidayat dan Machali, mengemukakan bahwa manajemen mutu dalam pelaksanaan program pendidikan bukanlah tujuan tetapi alat atau metode untuk mencapai mutu dan meningkatkan *performance* yang diharapkan.⁵ Banyak cara dalam meningkatkan mutu diantaranya menggunakan standar-standar sistem manajemen yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 309.

⁵ Ara Hidayat dan Imam Machali, *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), hlm. 322.

telah di rumuskan oleh lembaga-lembaga penjamin mutu. Sistem manajemen yang telah ada seperti *International Standardization of Organisation (ISO)*, *Six Sigma*, *Malcolm Baldrige*, *Singapore Quality Award*, SNI (Standar Nasional Indonesia), dan IPS (*Indonesian Plywood Standard*).

Semua orang dalam konsep *Total Quality Management (TQM)* adalah pelanggan yang harus menjadi pusat perhatian dalam memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya. Kepuasan peserta didik terletak pada proses yang sedang berlangsung dan hasil pendidikan yang memuaskan. Dalam proses pendidikan, apakah semua sumber daya tertuju pada cara menyukseskan proses atau kurang kesadaran akan hal tersebut sehingga menjadikan pekerjaan sebagai sesuatu yang rutin, tidak menantang, dan memberi sedikit tanggung jawab.

Pada TQM, kesadaran akan pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkualitas harus berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Menandai suatu instansi yang bermutu perlu pembuktian melalui produk yang dihasilkannya. Pembuktian terhadap pendidikan bukanlah hal yang mudah karena sifatnya yang *intangible* maka perlu adanya jaminan terhadap kualitas pendidikan. Tolok ukur bagi jaminan kualitas (*quality assurance*) pendidikan lebih diapresiasi sebagai efektivitas sekolah.

C. Madrasah Bermutu

Charles Hoy dalam bukunya *Improving Quality in Education*, merumuskan kualitas pendidikan adalah evaluasi dari proses mendidik yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan mengembangkan bakat siswa dalam suatu proses, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien yang membiayai proses atau output dari proses pendidikan.⁶

Menurut Hoy dan Miskel, sekolah bermutu adalah sekolah yang efektif, yang terdiri dari tatanan input, proses, dan out-put.⁷ Dengan demikian, madrasah bermutu adalah madrasah yang menerapkan rumusan sekolah efektif. Secara *out-put*, hasil yang diperoleh dari madrasah efektif adalah: *Pertama*, dari aspek siswa, lulusan yang dihasilkan adalah siswa yang memiliki prestasi akademik yang unggul, punya kreativitas, percaya diri, aspiratif, tidak ragu untuk mengemukakan pendapat, memiliki

⁶ Hoy, Charles, at.all. 2000. *Improving Quality in Education*. London : Falmer Press. p.10.

⁷ Hoy, Wayne K., dan Cecil G. Miskel. 2008. *Educational Administration ; Theory, Research, and Practice*. McGraw-Hill. P.91

ekspektasi yang tinggi, selalu hadir dalam kegiatan, dan memiliki tingkat kelulusan yang tinggi, dan sebaliknya, angka putus sekolah tidak ada sama sekali atau nol persen.

Selain berprestasi tinggi, siswa juga memiliki karakter yang menjadi ciri khas madrasah. Imam Ghazali, seorang pemikir Islam memberikan tuntunan budi pekerti yang luhur yang dapat menjadi bagian dari karakter siswa. Siswa harus didorong untuk memupuk perilaku baik berdasarkan sistem suara seperti nilai-nilai sebagai mengatakan kebenaran, iman, kejujuran, kerendahan hati dan menghindari kesombongan. Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan adalah proses total yang harus merawat setiap aspek manusia-intelektual, psikologis, sosial, fisik dan spiritual. Pengajaran harus dilakukan secara sensitif, sehingga perbedaan antara siswa diakui dan mereka dibantu untuk berkembang sesuai kemampuan dan kepentingan mereka sendiri.⁸

Pada jenjang pendidikan madrasah, kompetensi yang diharapkan dari siswa lulusannya adalah: Mampu membaca al-quran dan memahaminya, berakhlak mulia, memahami fikih Islam, terbiasa melakukan ibadah sehari-hari, mampu menyampaikan ceramah sederhana, dan mampu mengambil *i'tibar* atau pelajaran dari sejarah Islam. Selain itu, siswa juga diharapkan mampu: (1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan yang telah ditanamkan dalam keluarga, (2) Menyalurkan bakat dan minatnya serta mengembangkannya secara optimal, (3) Memperbaiki kekurangan dan kelemahannya dalam mengamalkan ajaran Islam, (4) Menangkal pengaruh negatif kepercayaan atau budaya lain yang membahayakan keyakinan, (5) Menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik dan sosial agar sejalan dengan ajaran Islam, (6) Menjadikan Islam sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, (7) Mampu memahami Islam secara menyeluruh sesuai dengan daya serap siswa dan waktu yang dimilikinya.⁹

Kedua, dari aspek guru, sekolah yang bermutu memperhatikan kepuasan kerja guru, angka absen nol persen, dan pergantian atau memberikan amanah kepada guru untuk tugas-tugas tertentu. Komariah dan Triatna, mengemukakan bahwa guru merupakan ujung tombak pendidikan. Keberadaan guru menjadi aspek penting bagi keberhasilan sekolah, terutama bagi guru yang melaksanakan fungsi mengajarnya

⁸ Joy A Palmer, *Fifty Major Thinkers on Education*, (London and New York: Routledge, 2001), hlm. 35

⁹ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 82-83

dengan penuh makna (*purposeful teaching*).¹⁰ Maksudnya guru sangat kompeten di bidangnya bekerja secara professional dan menjadi seorang yang serba bisa dan memiliki harapan tinggi terhadap profesi dan siswanya (*high expectation all round*). Guru menjadi seorang komunikator yang menanamkan harapan kepada siswanya (*communicating expectation*) dan guru adalah seorang yang cerdas yang senantiasa bergelut dengan ilmu pengetahuan serta menyenangkan tantangan intelektual.

Pada konteks madrasah, beberapa sifat yang harus dimiliki guru antara lain: Pendidik harus memiliki keteladanan (*uswah hasanah*) dalam sifat: (1) Tujuan, tingkah laku dan pola pikir guru bersifat *rabbani* yaitu hendaknya selalu bersandar kepada *Rabb* dengan menaati-Nya, mengabdikan kepada-Nya, mengikuti syariat-Nya dan mengenal sifat-sifat-Nya. (2) Hendaknya guru seorang yang ikhlas. (3) Guru bersabar dalam mengajarkan berbagai pengetahuan kepada anak-anak. (4) Jujur dalam menyampaikan apa yang diserukannya. (5) senantiasa membekali diri dengan ilmu dan kesediaan membiasakan diri untuk terus mengkajinya. Guru berpengetahuan luas dengan ilmu yang dikajinya. (6) Hendaknya guru mampu menggunakan berbagai metode mengajar secara bervariasi. Penguasaan ilmu saja belum cukup, karena tidak setiap orang berilmu mampu mentransformasikannya kepada anak didik. (7) Guru mampu mengelola siswa, tegas dalam bertindak serta meletakkan berbagai perkara secara proporsional. (8) Mempelajari kehidupan psikis para pelajar selaras dengan masa perkembangannya ketika mengajar mereka, sehingga dia dapat memperlakukan mereka sesuai dengan kemampuan akal dan kesiapan psikis mereka. (9) Tanggap terhadap berbagai kondisi dan perkembangan dunia yang mempengaruhi jiwa, keyakinan dan pola berpikir angkatan muda. (10) Seorang guru dituntut memiliki sifat adil terhadap seluruh anak didiknya.¹¹

Murid memandang guru sebagai teladan utama bagi mereka. Mereka akan mengikuti jejak akhlak, ilmu, kecerdasan, keutamaan dan semua gerak gerik gurunya. Maka seyogyanya guru menyesuaikan diri dengan prinsip dan nilai yang mereka ajarkan. Guru merupakan gambaran hidup yang memantulkan keutamaan tingkah laku yang sebenarnya sehingga murid dapat membiasakan diri dengan contoh tersebut dan

¹⁰ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership; Menuju Sekolah Efektif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 42

¹¹ An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, terj. Oleh Shihabuddin, (Jakarta : GIP, 2004), hlm. 170-175

sebagai syiar yang harus ditegakkan secara lahir dan batin.¹²

Sejalan dengan sifat-sifat tersebut, Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa guru juga memiliki tugas untuk mengetahui karakter murid-muridnya, meningkatkan keahliannya baik dalam bidang yang diajarkan maupun cara mengajarkannya, dan mengamalkan ilmunya, jangan berbuat berlawanan dengan ilmu yang diajarkannya.¹³

Ketiga, dari aspek pengelola (administrator), sekolah bermutu juga memperhatikan kepuasan kerja para staf, menyediakan anggaran yang seimbang, dan memiliki staf yang komitmen dan loyalitas kepada madrasah. *Keempat*, dari luar madrasah, masyarakat memberikan citra yang positif terhadap sekolah atau madrasah, hingga menjadikannya pilihan utama untuk mempercayakan pendidikan putra putri mereka.

Hasil penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan Glendale Union High School (GUHS), telah memposisikan komponen-komponen lain sebagai komponen yang kepentingannya sejajar dengan kepentingan lulusan. Hal demikian terjadi karena sekolah efektif adalah sekolah yang seluruh komponennya mencapai tujuan secara optimal, bukan hanya pada prestasi siswa tetapi pada prestasi sekolah. Penelitian yang dilakukan GUHS tersebut menunjukkan bahwa lulusan merupakan salah satu aspek dari ciri sekolah efektif. Aspek-aspek lain merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam mengelola lembaga sekolah yang tidak terlepas dari aspek guru, kepala sekolah, staf, kemitraan antara sekolah dengan masyarakat, tujuan pendidikan, program pendidikan atau kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, monitoring pembelajaran, evaluasi belajar, iklim sekolah, dan daya dukung sumber daya lain, seperti sarana-prasarana, alat, media, dan sumber belajar.¹⁴

Sukmadinata menyebutkan bahwa madrasah, sebagaimana sekolah pada umumnya, akan mampu mencapai keunggulan dan mutu melalui penguasaan pengetahuan dan kecakapan dalam bidang studi atau mata pelajaran yang dipelajarinya. Mereka tidak sekadar tahu atau kenal, tetapi mereka harus paham, cakap,

¹² Muhammad Abdul Kadir Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 57

¹³ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 79

¹⁴ Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership; Menuju.....* hlm. 37

mampu, serta mahir menggunakannya. Kecakapan dan kemahiran saja belum cukup sebab harus diikuti dengan kemauan, semangat, dan tekad untuk menyatakannya.¹⁵

Hefner melihat madrasah di Indonesia bersifat terbuka. Mayoritas sekolah-sekolah Islam secara sukarela untuk membuka kesempatan dalam mempelajari kurikulum umum atau pendidikan “sekuler” selain Islam. Lembaga pendidikan Islam bertujuan bukan hanya untuk memberikan pengetahuan dan nilai-nilai kepada anak, tetapi memberikan persepsi bahwa pendidikan agama menyediakan wacana yang terbuka untuk masyarakat dan negara. Penerapan pendidikan Islam di Indonesia terdiri dari tiga institusi utama: (1) pengajian Al Qur’an, belajar membaca dan melafalkan Al-Quran tapi tidak sampai memahami Al-Qur’an, (2) belajar di pesantren atau pondok, lembaga dengan asrama bagi siswa yang bercita-cita untuk melanjutkan tradisi ilmu pengetahuan agama Islam (menjadi ulama), dan (3) Belajar di madrasah, yang menyerupai pendidikan di sekolah, dengan muatan kurikulum pendidikan agama dan umum.¹⁶

Salah satu karakteristik madrasah adalah berkembang secara evolutif, dimulai dari sebuah pengajian di mushola/masjid kemudian menjadi madrasah diniyah dan akhirnya menjadi madrasah. Proses evolusi madrasah selama ini ada yang berlangsung dengan baik dan ada yang jalan ditempat, tetapi sangat jarang yang mati. Semua itu tergantung pada orang-orang yang ada di dalamnya.

Menyoroti pendidikan madrasah yang diterapkan di Indonesia, Tobroni, dalam artikelnya menuliskan bahwa menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan). Namun demikian perhatian pemerintah terhadap keberadaan madrasah masih sangat kurang, bahkan menurut Yahya Umar menyebutnya sebagai “*forgotten community*”. Pernyataan Yahya Umar tersebut bagi banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya.¹⁷

Berdasarkan data yang dikeluarkan *Center for Informatics Data and Islamic Studies* (CIDIES) Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama), dan data base

¹⁵ Nana Syaodih Sukmadinata, dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 6

¹⁶ Robert W Hefner, *Making Modern Muslims; The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 2009), hlm. 59

¹⁷ Tobroni, *Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah* dalam <http://re-searchengines.com/drtobroni5-07.html> [07 Juni 2012]

EMIS (*Education Management System*) Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 36.105 madrasah (tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren). Dari jumlah itu 90,08 % berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang berstatus negeri.

Kondisi status kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena keberadaan lembaga-lembaga pendidikan dasar dan menengah di tanah air pada umumnya sangat tergantung kepada pemerintah. Atas dasar itu, tidak terlalu salah kalau dikatakan bahwa madrasah- madrasah swasta yang berjumlah 32.523 buah mengalami masalah yang paling mendasar yaitu berjuang keras untuk dapat bertahan.

Yahya Umar, yang pernah menjabat sebagai dirjen pendidikan Islam Kementerian Agama, menawarkan upaya untuk melakukan perbaikan terhadap madrasah dengan tiga tindakan.¹⁸¹⁸ *Pertama*, menyetatkan madrasah. Mewujudkan budaya madrasah, diperlukan konsolidasi idiil berupa reaktualisasi doktrin-doktrin agama yang selama ini mengalami pendangkalan, pembelokan dan penyempitan makna. Konsep tentang ikhlas, jihad, dan amal saleh perlu direaktualisasikan maknanya dan dijadikan *core values* dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah. Dengan landasan nilai-nilai fundamental yang kokoh, akan menjadikan madrasah memiliki modal sosial (*social capital*) yang sangat berharga dalam rangka membangun rasa saling percaya, kasih sayang, keadilan, komitmen, dedikasi, kesungguhan, kerja keras, persaudaraan dan persatuan. Dengan *social capital* yang baik, akan memunculkan semangat berprestasi yang tinggi, dan terhindar dari konflik.

Kedua, kurangi beban. Penyelenggaraan kurikulum madrasah perlu diformat sedemikian rupa agar tidak terpacu pada formalitas yang padat jam tetapi tidak padat misi dan isi. Orientasi pendidikan tidak lagi pada “*having*” tetapi “*being*”, bukan “*schooling*” tetapi “*learning*”, dan bukan “*transfer of knowledge*” tetapi membangun jiwa melalui “*transfer of values*” lewat keteladanan. Metode yang mengarah pada, “*quantum learning*”, “*quantum teaching*” dan “*study fun*” perlu dikritisi. Budaya belajar bangsa Indonesia tidak harus mencontoh model Eropa seperti bermain sambil

¹⁸ *Ibid.*

belajar, guru hanya sebagai fasilitator, atau menekankan proses dari pada hasil.

Budaya belajar bangsa Indonesia yang berhasil membesarkan banyak orang justru adalah budaya yang mengembangkan sikap kesungguhan, prihatin (tirakat), ikhlas (*nrimo, qanaah*), tekun dan sabar. Siswa madrasah harus dididik menjadi generasi yang tangguh, memiliki jiwa pejuang, seperti sikap tekun, ulet, sabar, tahan uji, konsisten, dan pekerja keras. *Multiple Intelligence* (*intellectual, emotional* dan *spiritual quotient*) siswa dapat dikembangkan secara maksimal justru melalui pergumulan yang keras, bukan sambil bermain atau dalam suasana *fun* semata.

Ketiga, mengubah beban menjadi energi. Pengelola madrasah baik pimpinan maupun gurunya haruslah menjadi orang yang cerdas, lincah dan kreatif. Pemimpin madrasah tidak sepatutnya hanya berperan sebagai administrator, “pilot” atau “masinis” yang hanya menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan, melainkan harus diibaratkan seorang “sopir”, “pendaki” atau “*entrepreneur*” yang senantiasa berupaya menciptakan nilai tambah dengan cara mendayagunakan kekuatan untuk menutupi kelemahan, mencari dan memanfaatkan peluang yang ada, dan merubah ancaman menjadi tantangan (analisis SWOT). Keterbatasan sumber daya (manusia, material, finansial, organisasi, teknologi, dan informasi) yang dimiliki madrasah bagi pemimpin yang berjiwa *entrepreneur* dan pendaki (*climber*) justru menjadi cambuk, lahan perjuangan (jihad) dan amal saleh. Ibaratnya, beban berat di sebuah mobil dapat diubah menjadi energi apabila sopirnya cerdas dalam memilih jalan yang menurun. Intinya, cara merubah beban menjadi energi adalah dengan cara berfikir dan berjiwa besar, positif, kreatif dan tidak kenal menyerah.

Pada konteks ini, untuk mempercepat peningkatan mutu madrasah secara efektif, diperlukan pemahaman terhadap hakekat dan problematika madrasah. Madrasah sebenarnya merupakan model lembaga pendidikan yang ideal karena menawarkan keseimbangan hidup: iman-takwa (imtak) dan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek). Di samping itu, sebagai lembaga pendidikan berbasis agama dan memiliki akar budaya yang kokoh pada masyarakat, madrasah memiliki basis sosial dan daya tahan yang luar biasa. Maslowski menyebutkan bahwa inti dari budaya sekolah adalah para guru. Guru dapat mempertimbangkan, hingga menentukan hal-hal yang baik atau hal-hak buruk yang terjadi pada sekolah dan selanjutnya

menginternalisasikannya kepada seluruh warga belajar di sekolah.¹⁹

Komariah dan Triatna mengutip laporan penelitian Bank Dunia yang mengidentifikasi empat aspek sekolah efektif, meliputi: *supporting inputs*, *enabling condition*, *school climate*, dan *teaching learning process*.²⁰ Keempat aspek tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. *Supporting inputs*

Karakteristik pertama ditinjau dari sudut input dukungan (*supporting inputs*), yaitu perangkat-perangkat yang turut menjelmakan sekolah efektif ditinjau dari dukungannya terhadap sistem sekolah. Dukungan-dukungan itu datang dari kelompok siswa, guru, staf lain, masyarakat, sistem penyelenggaraan pendidikan, sumber daya material seperti buku dan sarana lainnya.

Dukungan dari siswa adalah kesadaran siswa akan hak dan kewajibannya di sekolah dan belajar dengan prinsip kejujuran. Dukungan guru dan staf adalah menciptakan kondisi belajar yang sehat. Dukungan orang tua dan masyarakat terhadap program sekolah berupa dukungan terhadap sarana- prasarana, kelengkapan buku sumber, dan alat-alat praktik, serta adanya dukungan sistem yang diselenggarakan dengan efisien dan efektif.

b. *Enabling Conditions*

Kelompok karakteristik kedua adalah (*enabling conditions*) atau kondisi yang memungkinkan, yaitu kondisi yang membuat sekolah efektif itu mungkin akan terwujud dengan kondisi yang diciptakan oleh lingkungan atau sistem sekolah. Kondisi yang memungkinkan adalah kondisi yang mungkin dapat diwujudkan atau sesuatu yang dapat diupayakan atas kompetensi dan peluang yang ada. Kondisi sekolah efektif mungkin terwujud karena di sekolah tersebut dikondisikan oleh kepemimpinan yang efektif dan dilengkapi dengan kemampuan sebagai berikut. (1) Mengkomunikasikan visi, misi, dan nilai-nilai institusional. (2) Memotivasi staf untuk bertanggung jawab mengembangkan budaya mutu. (3). Meningkatkan komitmen terhadap perbaikan mutu secara kontinyu.

Di samping kepala sekolah yang kompeten, sekolah dimungkinkan untuk memiliki tenaga guru yang kompeten, fleksibel, dan melaksanakan otonomi

¹⁹ Maslowski, *A review of inventories for diagnosing school culture*, Journal of Educational Administration, Vol. 44 No. 1, (Emerald Group Publishing, 2006), hlm. 6-35

²⁰ Komariah, Aan, dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership; Menuju....*, hlm. 44

pengajarannya secara bertanggung jawab dan profesional.

Aspek lain yang menjadi bagian dari *enabling conditions* adalah waktu di sekolah yang lama dengan diisi oleh kegiatan-kegiatan belajar yang menyenangkan, berpusat pada anak, sesuai dengan perkembangan dan tugas anak, bermuatan budaya dan nilai-nilai spiritual, serta dikemas dengan memadukan atau mengintegrasikan kemampuan teoretis dengan praktis.

c. *School Climate*

Iklim sekolah (*school climate*) adalah sekolah efektif yang menekankan pada keberadaan rasa menyenangkan dari suasana sekolah, bukan saja dari kondisi fisik, tetapi keseluruhan aspek internal organisasi. Kewajiban sekolah adalah menciptakan lingkungan internal sebagai lingkungan yang menyenangkan, serasi, dan bertanggung jawab. Didalamnya terkandung harapan siswa yang tinggi, sikap guru yang efektif, keteraturan dan disiplin kurikulum yang terorganisasi, sistem *reward* dan insentif bagi siswa dan guru, serta tuntutan waktu belajar yang tinggi.

Madrasah yang menerapkan manajemen mutu, melaksanakan program mutu pendidikan dengan prinsip sebagai berikut.

a. Fokus pada pengguna

Setiap pihak di madrasah harus memahami bahwa setiap produk pendidikan mempunyai pengguna (*customer*). Setiap anggota dari madrasah adalah pemasok (*supplier*) dan pengguna. Pengguna pertama dari madrasah adalah keluarga atau siswa. Keluarga atau orang tua juga merupakan pemasok. Ada dua macam pengguna, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Pengguna internal, seperti orang tua, siswa, guru, administrator, staf, dan majelis madrasah. Pengguna eksternal seperti masyarakat, pimpinan perusahaan-industri, lembaga pemerintah, lembaga swasta perguruan tinggi, dan lembaga keamanan.

b. Keterlibatan menyeluruh

Semua pihak harus terlibat dalam transformasi mutu. Manajemen harus komitmen dan terfokus pada peningkatan mutu. Transformasi mutu harus dimulai dengan mengadopsi paradigma pendidikan baru. Kepercayaan lama harus dibuang. Langkahnya yang harus dilakukan dalam mengadopsi paradigma pendidikan baru adalah kualitas pendidikan yang tidak senantiasa bergantung pada banyaknya dana yang tersedia, namun dapat menemukan sumber-sumber lain berupa keterlibatan dari

berbagai pihak yang memiliki kemauan dan visi yang sama untuk mewujudkan madrasah bermutu.

c. Pengukuran

Pandangan lama mutu pendidikan atau lulusan diukur dari skor prestasi belajar. Dalam pendekatan baru, para profesional pendidikan harus belajar mengukur mutu pendidikan dari kemampuan dan kinerja lulusan berdasarkan tuntutan pengguna. Para profesional pendidikan perlu menguasai teknik-teknik pengumpulan dan analisis data, bukan saja data kemampuan lulusan, melainkan semua data yang terkait dengan kegiatan dan penunjang pelaksanaan pendidikan. Melalui pengumpulan dan analisis data, para profesional pendidikan akan mengetahui nilai tambah dari pendidikan, kelemahan dan hambatan yang dihadapi, serta upaya penyempurnaannya.

d. Pendidikan sebagai sistem

Peningkatan mutu pendidikan hendaknya berdasarkan konsep dan pemahaman pendidikan sebagai sistem. Pendidikan sebagai sistem memiliki sejumlah komponen, seperti siswa, guru, kurikulum, sarana-prasarana, media, sumber belajar, orang tua, dan lingkungan. Di antara komponen-komponen tersebut terjalin hubungan yang berkesinambungan dan keterpaduan dalam pelaksanaan sistem.

e. Perbaikan yang berkelanjutan

Dalam filsafat lama dianut prinsip: Jika sudah rusak, baru diperbaiki, sedangkan dalam filsafat mutu menganut prinsip, bahwa tiap proses perlu diperbaiki dan tidak ada proses yang sempurna perlu selalu diperbaiki dan disempurnakan.²¹

D. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Nurdin mengemukakan bahwa al-Qur'an menyebut masyarakat dengan dua terminologi, yaitu *qaum* dan *ummat*.²² Istilah *qoum* bermakna dasar yakni kelompok manusia, berdiri tegak atau tekad. Secara leksikal *qoum* adalah kelompok manusia yang dihimpun oleh satu hubungan atau ikatan yang mereka tegakkan ditempat kaum itu berada. Qur'an menyebut istilah *qoum* sebanyak 383 kali dengan sifat dan konotasi yang berbeda-beda, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan *term* lain yang bermakna sama.

²¹ Nana Syaodih Sukmadinata, dkk, *Pengendalian Mutu Pendidikan*, hlm.12-13

²² Ali Nurdin, *Qur'anic Society; Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Quran*. (Jakarta: Erlangga, 2006) hlm. 57

Ada kata *qaum* yang menunjukkan sifat positif seperti kaum yang yakin (*qaumun yuqinun*), kaum yang beriman (*qaumun yu'minun*), kaum yang saleh (*qaum al-shalih*), kaum yang bersyukur (*qaumun yasykuruun*), kaum yang ahli ibadah (*qaum al-'abidin*). Adapun yang menunjukkan sifat negatif seperti kaum yang menyimpang (*qaumun ya'dilun*), kaum yang *zholim* (*qaum al-zhalimin*), kaum yang kafir (*qaum al-kaafirin*), kaum yang fasik (*qaum al-fasiqin*), dan lain-lain.

Kata *qaum* juga ditujukan kepada semua jenis kelamin laki maupun perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata *qaum* adalah di alamatkan kepada kelompok manusia secara umum dengan bermacam-macam sifat dan ciri yang melekat padanya. Sedangkan kata *ummat* adalah bentuk tunggal dari kata *umam*. Secara bahasa memiliki makna tempat kembali, kelompok, agama, postur tubuh, masa dan tujuan, dari kata tersebut muncul kata *umm* (ibu), dan *imam* (pemimpin), terdapat hubungan makna antara keduanya menjadi teladan dan tumpuan masyarakat. Maka kata *umam* mengandung pengertian, kelompok manusia yang berhimpun karena didorong oleh ikatan-ikatan persamaan sifat, kepentingan dan cita-cita, agama, wilayah tertentu, dan waktu tertentu.

Pidarta mengemukakan bahwa masyarakat dalam dunia pendidikan adalah warga atau individu yang berada di sekolah atau madrasah dan di sekitar madrasah yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung terhadap manajemen sekolah atau madrasah, memiliki kesadaran sosial, dan mempunyai pengaruh terhadap lembaga. Masyarakat pendidikan adalah segenap komponen terkait yang memiliki hak serta kewajiban yang sama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program pendidikan, sehingga lazim muncul pernyataan tentang *stakeholder* atau pihak yang berkepentingan untuk melakukan tugas itu.²³

Beberapa wadah partisipasi masyarakat dalam pendidikan antara lain: (1) Dewan pendidikan (2) Komite sekolah (3) Persatuan orang tua siswa (4) Perkumpulan olah raga (5) Perkumpulan kesenian (6) Organisasi-organisasi lain. Sedangkan bidang partisipasi antara lain: (1) Kurikulum lokal (2) Alat-alat belajar (3) Dana (4) Material atau bangunan (5) Auditing keuangan (6) mengawasi kegiatan-kegiatan sekolah. Adapun cara berpartisipasi (1) Ikut dalam pertemuan (2) Datang ke sekolah (3) Lewat surat (4) Lewat telepon (5) Ikut malam seni (6) Ikut bazaar.

²³ Made Pidarta, *Landasan Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm.72

Sagala mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat memberi arti bahwa pemerintah sebagai pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, keterampilan, bahan dan jasa sebagai bentuk dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat berupa meluangkan waktu memantau kegiatan pendidikan, memberikan kontribusi dana untuk kelancaran biaya operasional madrasah, menyampaikan saran dan gagasan untuk memecahkan permasalahan pendidikan di madrasah, dan kepercayaan serta kemauan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan madrasah hingga lebih kompetitif.²⁴

Menurut Joan Dean, dalam bukunya *Managing Secondary School*, beberapa hal yang menggambarkan partisipasi masyarakat, yaitu:

- a. Representasi madrasah ke dunia luar. Madrasah mendapat pengakuan dari masyarakat di luar madrasah. Bentuk pengakuan antara lain: (1) anggota madrasah menghadiri pertemuan undangan dari luar, (2) anggota madrasah menjadi pembicara di luar madrasah, dan (3) anggota madrasah menjadi pengurus organisasi di luar madrasah
- b. Dukungan pemerintah. Pemerintah ikut mendukung terselenggaranya program-program yang berjalan pada madrasah. Dukungan itu meliputi: (1) menyetujui visi dan kebijakan madrasah beserta kurikulumnya, (2) membantu madrasah dalam membuat perencanaan, dan (3) menyediakan pelatihan bagi madrasah.
- c. Keterlibatan orang tua. Orang tua murid pun ikut dilibatkan sebagai bentuk nyata dari partisipasi masyarakat secara langsung. Bentuknya seperti: (1) madrasah mengakui orang tua sebagai *partner* pendidik, (2) komunikasi antara orang tua dan madrasah, dan (3) diskusi tentang keadaan siswa dan kebijakan madrasah.
- d. Membangun hubungan dengan pengusaha/perusahaan. Misalnya: (1) keterlibatan perusahaan dalam mendukung prestasi siswa, (2) siswa mengunjungi perusahaan untuk suatu tugas dari madrasah, dan (3) menjalin hubungan baik dengan perusahaan di sekitar madrasah.
- e. Mendorong penggunaan lingkungan masyarakat untuk bahan pelajaran. Misalnya: (1) Masyarakat lokal dan lingkungan memberikan bahan yang berharga bagi pembelajaran siswa, (2) Membantu siswa untuk ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan (3) Memberikan perhatian bagi siswa dalam bermasyarakat.²⁵

Dimensi partisipasi masyarakat, berdasarkan pendapat Garry Hornby, dikemukakan ada lima dimensi, yaitu: menjadi narasumber, berbagi informasi tentang anak, saluran komunikasi, *parent education*, dan bekerja sama dengan

²⁴ Syaiful Sagala, “*Dukungan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya di Sekolah*”. *Generasi Kampus*, 1 (2) 2008, hlm. 63.

²⁵ Joan Dean, *Managing The Secondary School*, (London : Routledge, 1993), hlm. 203

guru. Pertemuan antara orang tua dan guru sangat ditekankan, mengingat melalui pertemuan ini memiliki dampak positif bagi peningkatan prestasi belajar siswa. Para siswa yang orang tuanya hadir pada pertemuan dengan guru di madrasah memiliki tingkat presensi yang tinggi, tingkat perilaku negatif yang rendah, dan prestasi akademik yang meningkat. Selain pertemuan langsung, komunikasi melalui telepon atau surat juga dapat dijalin antara guru dan orang tua siswa.²⁶

Unsur-unsur masyarakat yang dapat menjalin kerjasama dalam pendidikan diantaranya adalah orang tua siswa, warga, dan lembaga masyarakat sekitar madrasah, tokoh masyarakat, lembaga agama, organisasi kemasyarakatan, pemerintah setempat, petugas keamanan dan ketertiban, sesama lembaga madrasah dan sekolah, pengusaha, pedagang dan industri. Oleh karena madrasah berada di dalam masyarakat, maka masukan dan umpan balik masyarakat yang ditujukan kepada madrasah harus segera direspon demi kemajuan, kebaikan dan mutu madrasah.

Keterlibatan orang tua sebagai bentuk peran serta masyarakat itu dibentuk dalam wadah komite dan dewan pendidikan. Salah satu cara memfungsikan masyarakat sebagai *stakeholder* tersebut adalah dengan menggunakan prinsip perwakilan, yaitu memilih sejumlah kecil dari seluruh anggota masyarakat untuk melaksanakan fungsi-fungsi kontrol, pemberi masukan, pemberi dukungan, serta fungsi mediator antara masyarakat dengan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi-fungsi tersebut dilakukan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah pada tingkat satuan pendidikan. Sampai dengan akhir tahun 2006, Depdiknas telah berhasil melakukan fasilitasi pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di seluruh tanah air. Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tersebut untuk sementara ini diatur oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002, sebelum adanya PP yang kini dalam proses. Kepmen tersebut dijadikan landasan bagi setiap Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah di daerahnya masing-masing.

Pada organisasi sekolah, keberadaan komite sekolah pada satuan pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ada prinsip yang harus di pegang

²⁶ Garry Hornby, *Parental Involvement in Childhood Education*, (New York: Springer, 2011), hlm. 64-67

oleh semua anggota komite sekolah, yaitu komite sekolah tidak mengambil peran satuan pendidikan, dan tidak juga mengambil peran pemerintah atau birokrasi. Dengan kata lain, komite sekolah bergerak pada porosnya sendiri, yakni melakukan tugas sebagai sebuah komite.²⁷

Budimansyah menyebutkan bahwa ada beberapa asumsi pentingnya penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.²⁸ *Pertama*, menggunakan pengalaman sekolah swasta yang memiliki ketergantungan sangat rendah, sehingga sekolah cenderung lebih berorientasi kepada kemampuan yang memungkinkan keterlibatan orang tua/masyarakat secara lebih bermakna dalam penyelenggaraan pendidikan. *Kedua*, penyelenggaraan pendidikan di daerah akan lebih efektif bila didukung oleh sistem berbagi kekuasaan (*power sharing*), antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pendidikan, seiring dengan berubahnya paradigma sistem pemerintahan dewasa ini. Demikian strategisnya peran masyarakat dalam hal ini, bahwa masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat umum, masyarakat terorganisir maupun orang tua murid, bersama-sama menjalankan fungsi dan peran yang diamanatkan UU tersebut.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan harus berusaha mencapai tingkat masukan yang merata, keluaran yang bermutu, kegairahan dan motivasi belajar yang tinggi, semangat kerja yang besar, dan adanya kepercayaan dari berbagai pihak.²⁹ Penting bagi madrasah untuk mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Pada suatu penelitian, Bryte dan Schneider menemukan bahwa sekolah-sekolah dengan tingkat kepercayaan yang tinggi memiliki satu dari dua kesempatan membuat perbaikan yang signifikan. Sedangkan sekolah yang rendah tingkat kepercayaan dari masyarakat hanya memiliki satu dalam tujuh kesempatan untuk memperbaiki.³⁰ Dalam hal ini hanya madrasah yang melakukan perbaikan dalam kepercayaan yang dapat membuat perbaikan dalam kinerja akademik. Hasil penelitian menunjukkan pula bahwa integritas hubungan sosial adalah penting didahulukan demi segala bentuk

²⁷ Danny Meirawan, *Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: IPB Press, 2010), hlm. 121

²⁸ Dasim Budimansyah, *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*, *Educationist*, 2 (1) 2008, hlm. 63.

²⁹ Buchari Alma, *Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 64

³⁰ Tony Gelsthorpe dan John West-Burnham, *Educational Leadership and the Community; Strategies for School Improvement Through Community Engagement*, (London: Pearson, 2003), hlm.10

perbaikan kinerja oleh madrasah.

E. Kesimpulan

Partisipasi masyarakat dapat diupayakan dengan lebih dahulu memberikan pelayanan terbaik dari pihak madrasah kepada segenap pengguna madrasah. Pelayanan merupakan hal yang sangat penting sebab madrasah adalah lembaga yang melayani konsumen berupa siswa, dan juga masyarakat umum yang dikenal dengan “*stakeholder*”. Lembaga pendidikan pada hakekatnya bertujuan memberi layanan. Pihak yang dilayani menginginkan kepuasan dari layanan tersebut, sebab mereka sudah membayarnya melalui berbagai hal seperti SPP, investasi bangunan, dana ujian, bayaran pajak, bantuan pemerintah kepada pihak madrasah untuk layanan pendidikan bagi warganya dan lain-lain. Jadi pihak konsumen berhak mendapatkan layanan yang memuaskan.

Usaha peningkatan mutu madrasah kaitannya dengan penciptaan partisipasi masyarakat maka perlu digiatkan upaya seperti fokus pada pelayanan, kedisiplinan, kemandirian, kecepatan dalam pengambilan keputusan, pengendalian strategik, dan teknologi unggul. Dengan demikian, budaya mutu akan menjadi kesadaran bersama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien dan berkualitas. Dampak dari terciptanya mutu madrasah ini adalah kepuasan siswa.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Muhammad Abdul Kadir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Alma, Buchari, *Pemasaran Strategik Jasa Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- An-Nahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan Masyarakat*, terj. oleh Shihabuddin, Jakarta : GIP, 2004.
- Budimansyah, Dasim, *Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat*. *Educationist*, 2 (1), 2008.
- Dean, Joan, *Managing The Secondary School*, London: Routledge, 1993.
- Engkoswara, dan Komariah, Aan, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Gelsthorpe, Tony, dan West-Burnham, John, *Educational Leadership and the Community; Strategies for School Improvement Through Community Engagement*, London: Pearson, 2003.
- Hefner, Robert W, *Making Modern Muslims ; The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*, Honolulu: University of Hawai Press, 2009.
- Hidayat, Ara dan Machali, Imam, *Pengelolaan Pendidikan*, Bandung: Pustaka Educa, 2010.
- Hornby, Garry, *Parental Involvement in Childhood Education*, New York: Springer, 2011.

- Hoy, Charles, at.all, *Improving Quality in Education*, London: Falmer Press, 2000. Hoy, Wayne K., dan G. Miskel, Cecil, *Educational Administration; Theory, Research, and Practice*, McGraw-Hill, 2008.
- Komariah, Aan, dan Triatna, Cepi, *Visionary Leadership; Menuju Sekolah Efektif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Maslowski, *A review of inventories for diagnosing school culture*, Journal of Educational Administration, Vol. 44 No. 1, Emerald Group Publishing, 2006.
- Meirawan, Danny, *Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Masa Depan*. Bandung: IPB Press, 2010.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nurdin, Ali, *Qur'anic Society; Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal Dalam Al-Quran*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Palmer, Joy A, *Fifty Major Thinkers on Education*, London and New York: Routledge, 2001.
- Pidarta, Made, *Landasan Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sagala, Syaiful, "*Dukungan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya di Sekolah*". *Generasi Kampus*, 1 (2), 2008.
- Sallis, Edward, *Total Quality Management in Education*, London: Kogan, 1993.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, dkk. *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Tobroni, *Percepatan Peningkatan Mutu Madrasah*. dalam <http://re-searchengines.com/drtobroni5-07.html> [07 Juni 2012]